

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KABUPATEN SINTANG

Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

Oleh:
YOTI MEYSELA HARYANI
NIM. E21112021

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016.

Email: yotimeysela@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Permasalahan mengenai pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah ini cukup menarik untuk diteliti mengingat masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan, sehingga kebijakan tersebut dalam pengimplementasiannya masih belum optimal. Seperti kebiasaan petani dan perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan/lahan dalam membuka lahan disamping biayanya murah dan menghemat tenaga juga lebih cepat yang tidak memakan waktu terlalu banyak; standar dan tujuan kebijakan terkait pengendalian kebakaran hutan/lahan masih belum optimal, masih terdapat pihak yang membakar hutan/lahan dalam membuka lahan pertanian dan perkebunan; belum optimalnya partisipasi dari masyarakat (petani dan perusahaan) dalam mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilihat dari pengkoordinasian kerjasama antara masyarakat dan implementor; ketersediaan sumber daya belum mencukupi dimana sumber daya manusia masih minim dan sarana prasarana pemadaman belum memadai; akses jalan yang belum memadai; penegakan hukum masih belum tegas, karena tidak dapat mencicipakan efek jera bagi pelaku pembakaran. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi menurut Van Metter dan Van Horn yang meliputi standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana (disposisi), dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum dapat membebaskan Kabupaten Sintang dari kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, dalam hal ini implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada keenam variabel yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn, namun juga diperlukan peran dan dukungan dari masyarakat yang turut mendukung untuk menyukseskan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.

Kata-kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

IMPLEMENTATION OF LAND AND FOREST FIRE CONTROL POLICY IN SINTANG REGENCY: CASE STUDY ON MANGGALA AGNI OFFICE REGIONAL OPERATIONS SINTANG

Abstract

The aim of this study is to provide an understanding on the implementation of the land and forest fire control policy in Sintang. Problems concerning land and forest fire control in this area is quite interesting considering there are still a lot of occurrences of land and forest fires, so such a policy in its implementation is still not optimal. It is a common practice for farmers and plantation companies to burn forest/land to clear land in addition to cost and saving energy, it is also much faster time-saving; standards and policy objectives related to land/forest fire control are still not optimal. There are those who burn the land/forest to clear farmland and

plantations; low participation of the society (farmers and companies) in supporting the management of land and forest fires can be seen from coordinating cooperation between the community and the implementor; the availability of resources where the resources are not enough and inadequate infrastructure, inadequate road access, ineffective law enforcement because it cannot create a deterrent effect for the offenders. This study was descriptive research with qualitative approach. The theory used is the implementation theory by Van Metter and Van Horn which includes standard and policy objectives, resources, organizational characteristics, communication between related organizations, as well as implementation activities, implementor's attitudes (disposition), and social, economic and political environment. The results of this study cc that the implementation of land and forest fires control policy in Sintang still cannot prevent land and forest fires. Therefore, in this case, it not only depends the six variables put forward by Van Metter and Van Horn, but also needs the role and support of the community that also contributed to the success of policy implementation of land and forest fire control in Sintang.

Keywords: Implementation, Policy, Land and Forest Fire Control.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia khususnya wilayah Sumatera dan Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat telah menjadi perhatian serius baik nasional maupun internasional. Dampak kebakaran tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Indonesia tapi juga beberapa Negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Mengingat pentingnya akan sumber daya hutan dalam ikut menambah devisa negara, agar tidak terjadi penurunan, maka upaya perlindungan hutan dari gangguan luar terutama dari kebakaran perlu diusahakan semaksimal mungkin.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu unsur kerusakan

hutan yang paling utama dikenal di Indonesia dan pada umumnya terjadi antara bulan Juli sampai dengan November. Perladangan berpindah yang merupakan cara bercocok tanam paling sederhana/awal dalam sejarah pertanian yang dilakukan di hutan, menggunakan cara pembakaran hutan untuk persiapan lahannya.

Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal sebagai daerah yang tidak lepas dari permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang cukup besar. Kabupaten Sintang adalah salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan terutama pada musim kemarau. Pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sintang dituntut untuk dapat meminimalisir dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam hal ini diperlukan upaya sistematis untuk mencegah kebakaransesuai

dengan Pasal 20 PP Nomor 45 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perlindungan Hutan, bahwa untuk mencegah dan membatasi kebakaran hutan yang disebabkan oleh kebakaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf ayakni melindungi hutan dari kebakaran yang disebabkan oleh perbuatan manusia, dilakukan kegiatan pengendalian yang meliputi: (a) pencegahan; (b) pemadaman; (c) penanganan pasca kebakaran (ayat (1)). Untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yang meliputi pecegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan . maksud disusunnya Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan dalam pengendalian kebakaran hutan sehingga dapat berjalan secara efektif dan efesien.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan menurut observasi yang dilakukan oleh penulis, kebijakann pengendlian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih dikatakn belum stabil, hal ini terkait dengan data perkembangan hotspot yang masuk ke Kantor Manggala Agni Daops Sintang, dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Hotspot Per Tahun di
Kabupaten Sintang

No.	Tahun	Jumlah (titik)	Persentase (%)
1	2012	877	30,22
2	2013	462	15,92
3	2014	815	28,08
4	2015	748	25,78
Total		2902	100

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, menunjukkan bahwa perkembangan jumlah hotspot di Kabupaten Sintang setiap tahunnya masih belum stabil yakni mengalami kenaikan dan penurunan. Dari sini dapat diketahui bahwa hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi kebakaran hutan dan lahan apalagi jika dilihat dari faktor cuaca yang juga turut mempengaruhi (musim kemarau) dan penggunaan pola petanian yang digunakan (cara membakar). Hal ini tentu saja akan mengakibatkan penurunan hotspot sulit untuk ditangani.

Dengan melihat kondisi yang demikian maka pengontrolan yang dilakukan oleh implementor perlu untuk ditingkatkan. Selain itu kondisi yang demikian menjadikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah seakan-akan menjadi tumpul. Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan oleh pihak terkait dalam

pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi sia-sia. Hal ini dapat disebabkan karena aktifitas membuka lahan yang masih menggunakan cara tradisional yaitu cara membakar, selain biaya yang murah cara tersebut juga dianggap lebih cepat dan efektif dimana tidak memakan banyak waktu. Membuka lahan dengan cara membakar hutan merupakan hal yang secara tegas dilarang dalam undang-undang, yakni diatur dalam Pasal 69 ayat (1) huruf f UU PPLH yang berbunyi: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”. Namun ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar ini memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penularan api ke wilayah sekelilingnya. Hal ini artinya, membuka lahan dengan cara membakar pada dasarnya diperbolehkan dengan persyaratan tertentu. Namun jika melihat di lapangan, kejadian kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dan disalah artikan oleh beberapa pihak terkait. Disini penulis menganggap ketentuan tersebut tidak adil

jika diterapkan pula kepada para petani, dimana luas lahan yang dimiliki kurang lebih dari 2 hektar.

Berikut ini adalah data pemantauan titik api (hotspot) di Kabupaten Sintang tahun 2015, dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2

Sebaran titik hotspot Januari s/d 19 Oktober 2015 di Kabupaten Sintang Wilayah Kerja Manggala Agni Daerah Operasi Sintang

No	Kabupaten	Kecamatan	Jumlah (titik)	Persen (%)
1	Sintang	Ambalau	11	1,47
2	Sintang	Binjai Hulu	45	6,02
3	Sintang	Dedai	47	6,28
4	Sintang	Kayan Hilir	64	8,56
5	Sintang	Kayan Hulu	23	3,07
6	Sintang	Kayan Permai	65	8,69
7	Sintang	Ketungau Hilir	128	17,11
8	Sintang	Ketungau Hulu	24	3,21
9	Sintang	Ketungau Tengah	95	12,70
10	Sintang	Sepauk	65	8,69
11	Sintang	Serawai	10	1,34
12	Sintang	Sintang	18	2,41
13	Sintang	Sungai Tebelian	57	7,62
14	Sintang	Tempunak	96	12,83
Total			748	100

Tabel diatas menunjukkan jumlah hotspot secara keseluruhan di Kabupaten Sintang pada tahun 2015 sebanyak 748

titik, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Ketungau Hilir (128 titik), kedua Kecamatan Tempunak (96 titik), dan jumlah yang tidak jauh berbeda di Kecamatan Ketungau Tengah (95 titik). Dengan banyak ditemukannya jumlah titik hotspot di Kabupaten Sintang, hal ini menandakan bahwa daerah ini rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu diperlukan penanganan yang cukup ekstra dalam mengatasi permasalahan ini.

Kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan itu sendiri terdiri atas kegiatan pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca kebakaran. Kesemua kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan mulai dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi hingga kegiatan penanganan pasca kebakaran. Ini dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus terjadi setiap tahunnya, sehingga jikalau kebakaran tidak bisa dicegah akan tetapi paling tidak kebakaran yang terjadi berkurang sehingga tidak menimbulkan dampak kerugian yang cukup berpengaruh terhadap kehidupan. Berikut ini adalah kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3
Daftar Hasil Rekapitulasi Kegiatan
Pengendalian Kebakaran Hutan dan
Lahan Berdasarkan Status Kawasan di
Kabupaten Sintang pad Juni s/d
September 2015

No	Kab.	SK	JP	Luas (Ha)	
				TB	DP
1	Sintang	Hutan	1	20	2
2	Sintang	Perusahaan (PT. ASL BARAT)	3	250	35
3	Sintang	Lahan Masyarakat	97	875	376,765
Total			101	1145,25	413,65

Keterangan:

- Kab = Kabupaten
- SK = Status Kawasan
- JP = Jumlah Dipadamkan
- TB = Terbakar
- DP = Dipadamkan

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah pemadaman banyak dilakukan pada kawasan lahan masyarakat. Pada perusahaan juga terlihat cukup luas, sedangkan kawasan hutan juga tidak cukup luas. penyebab kebakaran itu sendiri bisa dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, atau adanya api loncat sehingga menyebar ke kawasan lain akibatnya kebakaranpun cukup hebat. Hal ini juga dapat dipicu oleh kontrol yang dilakukan pihak masyarakat itu sendiri yang masih minim, dan juga pihak implementor.

Ketersediaan sumber daya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih cukup minim.

Hal ini terlihat dari jumlah sumber daya manusia yang dimiliki sebanyak 60 orang. Jumlah yang demikian tentu saja tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Sintang dan banyaknya perkebunan juga lahan milik masyarakat. Selanjutnya terkait sumber daya sarana prasarana yang tersedia masih minim. Dikatakan minim oleh karena terdapat beberapa peralatan pemadaman yang belum optimal untuk digunakan di lapangan dan juga ada beberapa peralatan yang sudah rusak. Selain itu, kondisi peralatan transportasi yang juga belum optimal di lapangan dimana jika melakukan pemadaman menghadapi kendala kesulitan dalam melewati akses jalan menuju ke lokasi kebakaran yang terjadi. Penegasan sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pembakaran juga belum dapat menimbulkan efek jera. Standar dan tujuan kebijakan yang belum efektif, akses jalan menuju lokasi yang masih minim dan sulit dijangkau, serta partisipasi atau hubungan kerjasama antar pihak implementor dan masyarakat (petani dan perusahaan) belum berjalan efektif.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian yaitu faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pada indikasi permasalahan yang telah dikemukakan di latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian yaitu: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik yang dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Fokus perhatian implementasi kebijakan menyangkut kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Secara garis besar menurut Solichin (dalam Anggara, 2012:538) mengatakan

bahwa fungsi implementasi adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun aaran kebijakan publik diwujudkan ebagai hasil akhir (*outcome*) kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ad yaitu langung mengimplementaikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan tersebut.

Kamus Webster dalam Widodo (2012:86) implementasi diartikan sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2008:146) mengemukakan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputuan kebijakan sebelumnya. Untu itu

sebaik apapun suatu kebijakan jika tidak dapat diimplementasikan maka akan menjadi percuma. Dalam derajat lain Mazmanian dan Sabatier (dalam Agustino, 2014:139) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

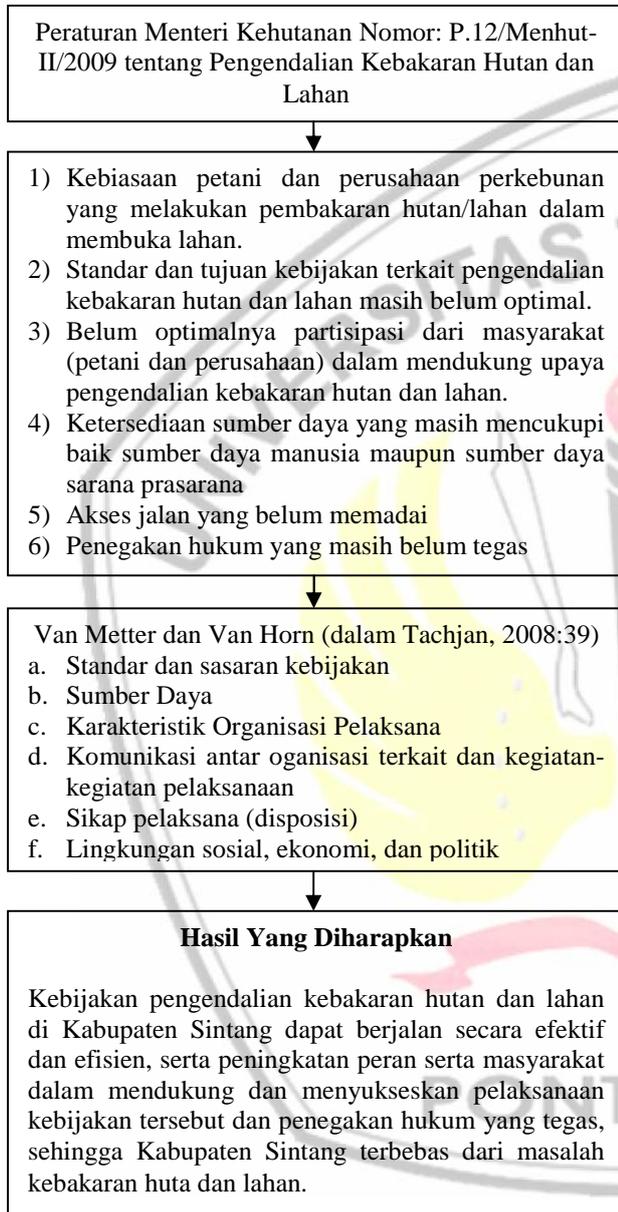
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2008:39) mengatakan bahwa setidaknya ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, antara lain:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
4. Komunikasi antar oganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap pelaksana (disposisi)
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Dalam penelitian penulis lebih memfokuskan pada teori Van Meter dan Van Horn (dalam Tachjan, 2008:39): standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana,

komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap pelaksana (disposisi), dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan di Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang. Alasan penulis mengambil tempat pada Kantor Manggala Daerah Operasi Sintang didasarkan pada pertimbangan, yaitu terdapat permasalahan yang diangkat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Sintangserta informasi yang diperlukan dalam mendukung penelitian ini.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi dan waktu penelitian yang penulis laksanakan yaitu bertempat di Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Kelam (Akcaya 1) KM 1 Kelurahan Akcaya Kecamatan Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah:

1. Kepala Daerah Operasi Kabupaten Sintang
2. Kepala Regu Manggala Agni Kabupaten Sintang
3. 3 orang masyarakat pemilik lahan di Kabupaten Sintang

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitian memuat tentang instrumen kunci dan instrumen bantu. Instrumen kunci dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri, sedangkan yang menjadi instrumen bantu antara lain:

- a) Pedoman wawancara, yaitu sebuah kegiatan mewawancari sumber-sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini serta disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b) Pedoman observasi, digunakan agar penulis dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman observasi ini disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subjek selama wawancara.

D. HASIL

Dalam hal permasalahan faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang belum optimal terdapat enam poin yang membahas mengenai faktor-faktor tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran kebijakan

Dalam mengimplementasikan kebijakan standar dan sasaran daripada suatu kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi. Seperti halnya juga untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, standar dan sasaran kebijakan menjadi hal yang sangat penting. Sebuah pemahaman dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan sangat didukung oleh seberapa jauh dan besar sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh implementor terkait tujuan dan sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa faktor standar dan sasaran kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan masih belum efektif. Tujuan kebijakan sudah dipahami oleh beberapa pihak terkait, namun untuk sasaran kebijakan masih belum tepat. Walaupun kegiatan sosialisasi sudah sering dilakukan namun kebiasaan masyarakat (petani dan perusahaan) dalam membuka lahan pertanian dengan cara membakar sulit untuk ditinggalkan. Ditambah lagi solusi atau alternatif yang tepat selain dari

kegiatan membakar belum dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, terkait hal ini pihak implementor diharapkan lebih efektif lagi melakukan sosialisasi dan pengontrolan terkait aktifitas masyarakat dalam bercocok tanam.

2. Sumber Daya

Syarat berjalannya suatu organisasi baik itu swasta ataupun negeri adalah kepemilikan terhadap sumber daya (*resources*). Untuk itu dalam mengimplementasikan kebijakan perlu adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya yang mendukung, supaya apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan dan direalisasikan secara baik, efektif, dan efisien.

Dalam penelitian ini terkait permasalahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tentunya sangat memerlukan adanya sumber daya yang mendukung. Seperti sumber daya manusia, dana, dan sarana prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait permasalahan tersebut diketahui bahwa dalam pengimplementasian kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan

yang dilaksanakan oleh Manggala Agni, kebutuhan akan sumber daya masih belum tercukupi. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan personil Manggala Agni di Kabupaten Sintang sebanyak 60 orang. Jumlah sedemikian banyaknya masih dirasakan belum mencukupi dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan khususnya pemadaman. Selain itu, diketahui juga bahwa terkait sumber daya dana ternyata masih belum memadai. Dan dari sumber daya sarana prasarana ternyata masih minim, dimana terdapat sejumlah peralatan perlengkapan pemadaman yang rusak dan kurang efektif untuk di lapangan, seperti mesin pemadam, selang, dan perlengkapan komunikasi (HT).

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam pengimplementasian kebijakan, karakteristik dari para pelaksana kebijakan harus tegas dan membina pada aturan serta taat pada sanksi yang berlaku. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya, sebab berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan dan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

Kabupaten Sintang, penulis melihat kinerja yang dilaksanakan oleh pihak implementor sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat mulai dari persiapan pencegahan kebakaran hutan hingga pada tahapan penanganan pasca kebakaran hutan, selain itu juga dilaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kejelasan dalam penyampaian tujuan kebijakan sudah baik dilaksanakan.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi suatu kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis lakukan, dalam upaya pencapaian keberhasilan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang yang dilaksanakan oleh Manggala Agni komunikasi menjadi sangat penting untuk dilakukan. Terkait dengan implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, proses penyampaian informasi sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya sebagaimana yang telah ditetapkan.

5. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi kinerja implementor kebijakan adalah sikap implementor. Disposisi adalah aspek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dan komitmen para pelaksana terhadap program, dimana pelaksana kebijakan kadangkala bermasalah apabila yang terkait didalamnya tidak dapat menjalankan kebijakan dengan baik. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedangkan jika pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan suatu program juga tidak akan berjalan efektif. Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian yang penulis lakukan, bahwa dalam hal ini respon dan pemahaman akan kebijakan oleh implementor (Manggala Agni) sudah sangat baik dan efektif dilakukan. Hal ini dapat dilihat bagaimana kinerja yang dilakukan di lapangan yaitu dimana pihak implementor secara langsung berbaur dan berkomunikasi dengan masyarakat terkait implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. Sedangkan terkait kegiatan pengawasan dalam hal ini dilakukan melalui kegiatan patroli dan groundcek lapangan ke daerah/wilayah yang rawan terjadi kebakaran, sehingga

kebakaran yang mungkin saja bisa terjadi dapat diminimalisir sedini mungkin.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Dalam mengimplementasikan kebijakan harus memperhatikan kondusifitas kondisi lingkungan eksternal. Sebab variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Keadaan ekonomi masyarakat adalah salah satu keadaan yang dapat mendukung keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang. berdasarkan wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa permasalahan kebakaran hutan dan lahan sangat mengganggu aktivitas kehidupan, sebab akibat dari kebakaran tersebut menimbulkan polusi udara yang dikarenakan kepulan asap kebakaran cukup hebat. Selain itu jika dilihat dari segi ekonomi, tentu saja mengakibatkan produksi sumber daya alam berkurang dan terhambatnya aktivitas masyarakat dimana

kegiatan yang dilakukan berada di luar ruangan.

Rekomendasi

Terkait permasalahan yang penulis angkat, berikut terdapat beberapa hal yang penulis rekomendasikan, sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan diperlukan adanya kerjasama antar pihak implementor, instansi terkait dan target group (masyarakat). Jika tidak ada kerjasama antara pihak-pihak tersebut maka tujuan kebijakan yang ingin dicapai akan sulit untuk diwujudkan. Demikian halnya dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang diperlukan kerjasama terutama antara pihak masyarakat dan implementor. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di lapangan, kerjasama antara pihak implementor dan masyarakat masih kurang optimal. Hal ini dilihat dari bagaimana komunikasi yang dilakukan masyarakat kepada implementor dalam hal perizinan atau pelaporan untuk melakukan aktivitas pembakaran pembukaan lahan perkebunan maupun pertanian. Jika kebakaran sudah terjadi dan mulai meluas hingga melewati kewasannya, barulah mendatangi kantor Manggala

Agni untuk meminta bantuan dalam melakukan pemadaman.

2. Penegakan Hukum

Dalam suatu kebijakan tentu akan ada tindakan hukum dan sanksi bagi yang melanggar. Demikian halnya dengan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang tentu saja terdapat aturan hukumnya. Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kabupaten Sintang setiap tahunnya perlu dilakukan penindakan hukum yang tegas agar dapat menciptakan efek jera bagi si pelaku pembakaran.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penegakan hukum di Kabupaten Sintang terkait larangan membakar hutan dan lahan dalam pembukaan lahan masih belum tegas. Hal ini dapat dilihat dimana masih sering terjadi kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya yang berulang-ulang. Pelaku pembakaran tidak ditindak secara tegas, sehingga terus melakukan kesalahan yang sama.

3. Akses Jalan

Sebagaimana yang diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang kerap terjadi di lahan masyarakat dan juga pada kawasan. Untuk mencapai keberhasilan

dalam pengendalian kebakaran tersebut terutama dalam pemadaman, tentu diperlukan akses jalan yang mendukung. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan kondisi akses jalan dalam pelaksanaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang terkadang mengalami kendala. Hal ini terlihat ketika melakukan pemadaman, jalan yang dilewati sulit diakses oleh kendaraan roda empat bahkan juga kendaraan roda dua. Selain itu letak terjadinya kebakaran yang berada di dalam kawasan dalam hutan juga sulit diakses tanpa menggunakan kendaraan. Untuk itu dalam hal ini akses jalannya masih minim dan kurang mendukung untuk mencapai tujuan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

E. KESIMPULAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Tujuan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang diterapkan di Kabupaten Sintang sudah dipahami oleh beberapa, namun terkait yang menjadi sasaran daripada kebijakan dirasakan masih belum tepat. Hal ini dapat dilihat dalam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan dimana masih terkendala oleh permasalahan

waktu dan perencanaan yang kurang efektif.

2. Sumber Daya

Jika dilihat dari kebutuhan sumber daya terutama kebutuhan sumber daya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih belum mencukupi, namun juga kerap kali mendapatkan bantuan dari instansi terkait seperti Damkar, BPBD dan TNI/POLRI. Demikian halnya terkait sumber daya anggaran juga belum mencukupi, dan sumber daya sarana prasarana dimana terdapat beberapa prasarana yang belum optimal untuk digunakan di lapangan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Seluruh tahapan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan, selain itu juga proses penyebaran tanggung jawab kepada instansi terkait yang juga mendukung dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan sudah baik, begitupun kepada pihak masyarakat namun partisipasi perlu ditingkatkan.

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Penyampaian informasi terkait kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang dilakukan melalui kegiatan patroli pencegahan, sosialisasi dan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta apel siaga. Untuk itu dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh pihak implementor (Manggala Agni) kepada target group dikatakan sudah sangat baik dilakukan. Kejelasan informasi dari pembuat kebijakan kepada pihak implementor dan target group juga sudah jelas. Untuk konsistensi, para pihak pelaksana sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan informasi yang disampaikan.

5. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Secara respon pelaksana kebijakan sudah cukup baik dimana dapat menentukan yang terbaik dilakukan dalam menangani permasalahan terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi. Disini juga cukup terlihat bagaimana pengontrolan yang dilakukan guna meminimalisir terjadinya kebakaran yaitu melalui kegiatan patroli dan grouncek lapangan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi sosial dan ekonomi saat terjadi kebakaran hutan dan lahan sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Dimana akibat dari kebakaran tersebut menimbulkan produksi asap yang cukup banyak sehingga menghambat aktivitas masyarakat lain di luar ruangan. Selain itu juga mengakibatkan sumber daya alam yang dimiliki semakin berkurang, sehingga terjadi penurunan pendapatan bagi masyarakat yang memanfaatkan hasil alam.

7. Partisipasi Masyarakat

Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan maka diperlukan partisipasi yang mendukung dari sasaran kebijakan, yaitu masyarakat. Terkait permasalahan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, peran dan partisipasi dari masyarakat masih kurang efektif. Hal ini dilihat dari bagaimana komunikasi yang dilakukan masyarakat kepada implementor dalam hal perizinan atau pelaporan untuk melakukan aktivitas pembakaran pembukaan lahan perkebunan maupun pertanian.

8. Penegakan Hukum

Kejadian kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kabupaten Sintang setiap tahunnya perlu dilakukan penindakan hukum yang tegas agar dapat menciptakan efek jera bagi pelaku pembakaran. Terkait penegakan hukum di Kabupaten Sintang masih kurang efektif, hal ini dapat dilihat dari penindakan kasus kebakaran yang tidak dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pembakaran. Sehingga kejadian kebakaran terus menerus terjadi setiap tahunnya.

9. Akses Jalan

Terkait pelaksanaan kebijakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, tentu dalam pencapaiannya diperlukan akses jalan yang mendukung. Hal ini bertujuan untuk mendukung dalam pencapaian tujuan kebijakan. Di Kabupaten Sintang akses jalan yang dilalui masih belum mendukung, kendaraan roda dua maupun roda empat terkadang mengalami kesulitan dalam menuju lokasi terjadinya kebakaran. Disamping jalannya yang penuh semak, juga terdapat jalan yang memang tidak bias dilewati oleh kendaraan dan harus berjalan kaki.

F. SARAN

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Terkait permasalahan yang terjadi dimana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang sulit untuk dikendalikan maka kinerja dari pihak implementor dalam penyampaian tujuan kebijakan perlu diefektifkan kepada sasaran kebijakan secara lebih jelas. Hal ini perlu dilakukan untuk menaikkan minat bagi masyarakat untuk terus bersama-sama menjaga lingkungan kawasan hutan. Selain itu juga diharapkan pihak implementor (Manggala Agni) dapat melakukan perencanaan kegiatan dengan baik dalam melakukan kegiatan sosialisasi, patroli dan kegiatan lainnya terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat direalisasikan dengan baik dan sesuai harapan.

2. Sumber Daya

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya pada bagian pembahasan kebutuhan akan sumber daya sangat penting dalam pencapaian tujuan kebijakan. Untuk itu dalam hal ini kebutuhan akan sumber daya dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang perlu untuk

ditingkatkan baik dari sumber daya manusia yang dimana perlu diberikan pendidikan dan pelatihan secara efektif dan efisien, kebutuhan akan anggaran yang perlu dikelola dengan baik, serta sarana prasarana yang perlu diperbarui pengadaannya agar lebih optimal dalam mencapai tujuan kebijakan.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan SOP yang dimiliki perlu untuk diefisienkan lagi, dan lebih bertanggung jawab lagi dalam mengemban tugas yang diamanahkan demi kepentingan, kenyamanan dan keselamatan bersama

4. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan lagi, kemudian kejelasan informasi perlu disampaikan dengan lebih jelas dan efektif kepada masyarakat agar lebih dipahami. Selain itu pemasangan baliho perlu diperbanyak dan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat.

5. Sikap Pelaksana (Disposisi)

Diharapkan implementor untuk lebih aktif dalam menjalankan tugas

dan kewajibannya sehingga kebakaran hutan dan lahan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sintang dapat diminimalisir. Kemampuan yang dimiliki terus dikembangkan dan dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga mampu bekerjasama dalam team dengan lebih sportif.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Diharapkan lebih peduli dan memperhatikan serta dapat bekerja sama dan berpartisipasi dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan tanpa ada unsur politik didalamnya.

7. Partisipasi Masyarakat

Diharapkan lebih optimal lagi dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan penyuluhan terkait pengendalian kebakaran hutan sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih asap dan mencintai lingkungan.

8. Penegakan Hukum

Diharapkan penegakan hukum yang ada lebih tegas agar setiap pelaku pembakaran dapat merasa jera dan lebih mencintai lingkungan terutama kawasan hutan.

9. Akses Jalan

Terkait permasalahan akses jalan, maka dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang, akses jalan yang ada perlu untuk diperhatikan hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan sehingga kebakaran hutan dan lahan dapat diminimalisir. Selain itu diperlukan juga kerjasama dalam membenahkan akses jalan sehingga dapat dilalui oleh kendaraan baik roda empat dan roda dua.

G. REFERENSI

Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Anggara, Sahya. 2012. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance. Bandung: Pustaka Setia.

Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasucha, Chaizi. 2004. Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Grasindo.

Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.

Purbawaseso, Bambang. 2004. Pengendalian Kebakaran Hutan Suatu Pengantar. Banjarbaru: Rineka Cipta.

Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2-1-. Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta.

-----, 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

-----, 2013. Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Truenorth.

Suharto, Edi. 2011. Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Widodo, Joko. 2012. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Peraturan:

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: 21& 22/KPTS/DJ-IV/2002 tentang Pedoman Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Indonesia dan Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan Barat& Kalimantan Tengah.

Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.3/IV-SET/2014 tentang Organisasi Manggala Agni dan Ilayah Kerja Daerah Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.12/Menhut-II/2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.

Jurnal:

Ghazali, Al. 2015. Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Keamanan Hutan dan Rehabilitas Hutan dan Lahan di Kabupaten Enrekang.

[http://repositoru.unhas.ac.id:4001/digilib/gdl.php?mod:browse&op=read&id=-alghazali-18986&PHPSESSID=4c66fe2b86848161919da3e320170](http://repositoru.unhas.ac.id:4001/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=-alghazali-18986&PHPSESSID=4c66fe2b86848161919da3e320170).

Yuliani, Febri. 2011. Implementasi Kebijakan Pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

<http://jurnal.unpad.ac.id/ijad/article/view/2643>.

Sumber lainnya:

<https://kertyawitaradya.wordpress.com/2010/04/13/implementasi-kebijakan-publik-model-Van-meter-van-horn-the-policy-implementation-process/>
<https://alamendah.org/2011/08/27/dampak-kebakaran-hutan/>
<http://pengertian-definisi.blogspot.co.id/2012/04/pengertian-dan-definisi-kebakaran-hutan.html>



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yoti Meysela Haryani
 NIM / Periode lulus : E21112021 / Periode 1 2016 / 2017
 Tanggal Lulus : 15 Agustus 2016
 Fakultas/ Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 E-mail address/ HP : yotimeysela@gmail.com / 085387922170

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

"Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang
 Studi Kasus pada Kantor Manggalo Agni Daerah Operasi Sintang"

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

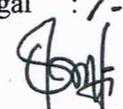
untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
 Pengelola Jurnal

 Dr. Pardi MAB
 NIP. 022 002 121 003

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 7-11-2016

 Yoti Meysela Haryani
 NIM. E21112021

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)